

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

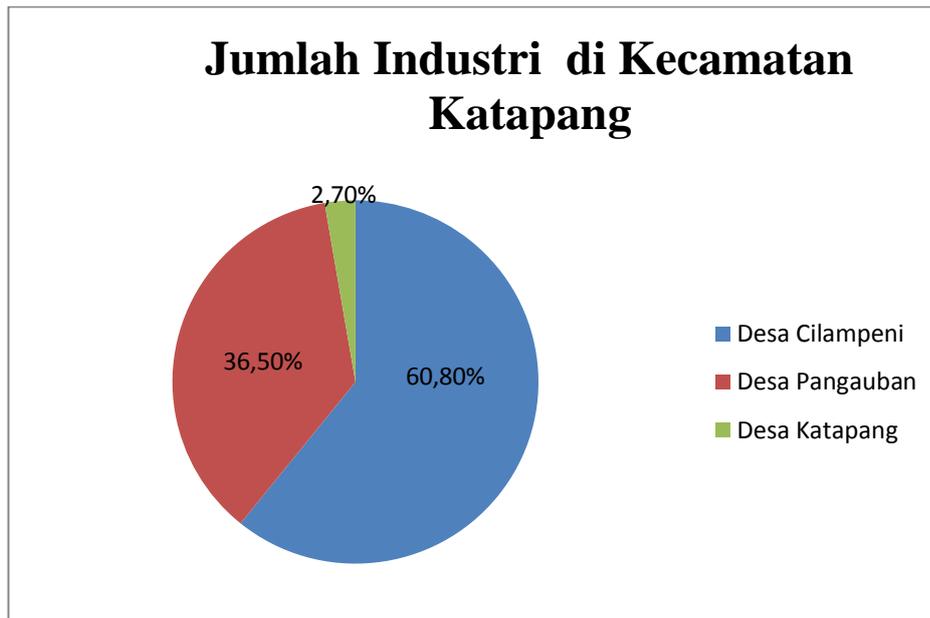
Setiap tahun terdapat suatu fenomena, di mana buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum, bahkan ada rencana untuk melakukan pemogokan massal di seluruh Indonesia. Fenomena ini terjadi karena biaya hidup (*cost of living*) kaum buruh dari hari ke hari terus meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK), namun disisi lain pemerintah selalu menaikkan upah minimum regional demi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Maka dari itu perlu pengkajian bagaimana pola konsumsi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhannya, padahal kebutuhan dasar antara individu yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, kebutuhan dasar tersebut antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan yang lainnya.

Khusus tentang upah bagi pekerja/buruh pabrik seolah selalu menjadi permasalahan rutin setiap tahunnya yang tidak kunjung selesai dan selalu memberikan dampak yang cukup luas, baik bagi pekerja/buruh dan pengusaha pada khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya. Salah satu dampak yang setiap tahun muncul adalah adanya unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh pekerja/buruh dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan upah, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja/buruh dan keluarganya

**Tabel 1.1**  
**UMK Kabupaten Bandung 2016-2018**

Provinsi	Kabupaten	2016	2017	2018
Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Rp.2.275.715	Rp.2.463.461,49	Rp.2.678.028,98

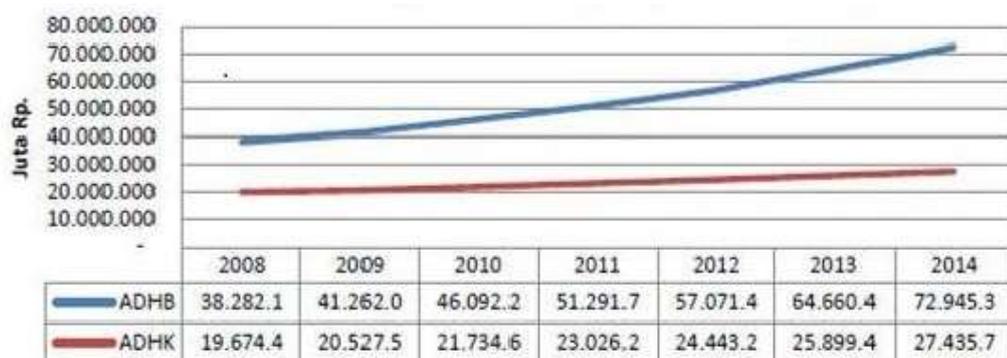
Berdasarkan tabel 1.1 Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah Minimum dapat diterapkan berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Setiap tahunnya UMK Kabupaten Bandung mengalami kenaikan rata-rata per tahun 200rb. Tapi disisi lain, pihak pekerja/buruh sering melakukan tindakan unjuk rasa untuk menolak penetapan UMK dari pemerintah, karena dianggap tidak memuaskan bagi mereka.



**Grafik 1.1 Jumlah Industri**

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat diketahui dari sumber BPS bahwasannya kawasan industri di Kecamatan Katapang meliputi 3 desa yaitu: Desa Cilampeni, Desa Pangauban dan Desa Katapang. Lebih dari setengahnya berada di Desa Cilampeni, dengan adanya kawasan industri kebutuhan akan tenaga kerja di Kabupaten Bandung cukup tinggi. Banyak sekali masyarakat yang datang dari luar kota untuk menjadi tenaga kerja di Kabupaten Bandung, dikarenakan Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu daerah yang maju secara ekonomi di Indonesia, dan di sisi lain pemerintah terus mengupayakan perbaikan dan perkembangan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi daerah sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Dari sekian banyak industri yang terdapat di Kecamatan Katapang, Penulis memilih industri PT. Seikou karena PT. Seikou merupakan perusahaan yang penyerapan tenaga kerjanya paling besar diantara perusahaan

lainnya dan PT. Seikou adalah satu-satunya Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang pembuatan cover kursi pijat, bantal medis, tikar sauna dan automobile dengan kualitas tinggi dan teknologi yang canggih di Indonesia



**Grafik 1.2**

### **Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung 2008-2014**

Kenaikan kinerja ekonomi Kabupaten Bandung tersebut juga ditunjukkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2008 berdasarkan Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp.38.282,1 juta dan Rp.19.674,4 juta mengalami kenaikan secara konstan setiap tahun.

Dimulai dari tahun 2009 ADHB sebesar Rp.41.262.0 juta dan ADHK sebesar Rp.20.527.5 juta mengalami kenaikan masing-masing menjadi ADHB sebesar Rp.46.092.2 juta dan ADHK sebesar Rp.21.734.6 juta pada tahun 2010.

PDRB Kabupaten Bandung terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2011, ADHB meningkat menjadi Rp.51.291.7 juta dan ADHK meningkat menjadi Rp.23.026.2 juta pada tahun 2011.

Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Bandung kembali meningkat, ADHK sebesar Rp.57.071.4 juta menjadi Rp.64.660.4 juta dan ADHB sebesar Rp.24.443.2 juta menjadi Rp.25.899.4 juta. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan setiap tahun.

**Tabel 1.2**  
**Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung**  
**Tahun 2017**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	130.381	60.245	190.626
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>299.162</b>	<b>186.782</b>	<b>485.944</b>
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	220.596	128.999	349.595
Jasa Kemasyarakatan	117.652	81.261	198.913
Lainnya	209.767	3.520	213.287
<b>Total</b>	<b>977.558 orang</b>	<b>460.807 orang</b>	<b>1.438.365 orang</b>

Sumber: Kabupaten Bandung dalam angka 2017

Lapangan pekerjaan utama di kabupaten terbagi menjadi beberapa sektor diantaranya ialah, Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yang dimana memiliki jumlah tenaga kerja laki-Laki sebanyak 130.381/orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 60.245/orang dengan total keseluruhan mencapai 190.626/orang.

Di sektor kedua ialah industri pengolahan yang dimana memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak diantara sektor lain, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 299.162/orang dan untuk tenaga kerja perempuan sebanyak 186.782, sehingga jika ditotalkan mencapai 485.944/orang.

Sektor lainnya ialah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel yang memiliki jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 220.596/orang dan untuk tenaga kerja perempuan sebanyak 128.999/orang, dan total keseluruhan tenaga kerja di bidang tersebut mencapai 349.595/orang.

Sedangkan di sektor pelayanan jasa terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya yang hanya memiliki jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 117.652/orang, dan untuk tenaga kerja wanita sebanyak 81.261/orang, sehingga jumlah keseluruhan di sektor pelayanan jasa hanya memiliki tenaga kerja sebanyak 198.913/orang.

Di sektor lainnya yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa memiliki jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 209.767/orang

dan untuk tenaga kerja perempuan sebanyak 3.520/orang, dengan total keseluruhan tenaga kerja mencapai 213.287/orang.

Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 977.558/orang dan untuk tenaga kerja perempuan sebanyak 460.807/orang, jadi jumlah untuk keseluruhan tenaga kerja di Kabupaten Bandung sebanyak 1.438.365/orang, dari beberapa sektor yang ada, sektor industri pengolahan memiliki jumlah tenaga kerja yang paling banyak diantara lainnya, dikarenakan Kabupaten Bandung memiliki jumlah industri yang banyak, sehingga mayoritas penduduk tenaga kerja di Kabupaten Bandung bekerja di sektor industri pengolahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektoral selalu terkonsentrasi pada daerah yang relatif lebih maju, sementara untuk daerah yang kurang berkembang tidak menjadi wilayah kegiatan industri. Perbedaan perlakuan inilah yang menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dimana daerah maju memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedang wilayah agraris mengalami perlambatan. Kesenjangan pendapatan yang tinggi tentu akan berimplikasi pada perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi oleh individu, rumah tangga, maupun perusahaan tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya. Banyak faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, salah satunya adalah pendapatan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Keynes, faktor pendapatan memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi (Mankiw, 2003).

Tidak berbeda dengan konsumsi yang dilakukan, semakin tinggi pendapatan maka konsumsi yang dilakukan tidak lagi hanya sebatas pada

kebutuhan pangan, tapi non pangan. Dalam Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Artinya keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi non pangan jauh lebih tinggi dari pada pengeluaran pangan. (Salvatore, 2006)

Pendapatan merupakan faktor terpenting dan penentu utama dari konsumsi (Nanga, 2005:123). Teori yang dikemukakan oleh Keynes dinamakan hipotesis pendapatan mutlak didasarkan atas hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi yang menyatakan apabila pendapatan mengalami kenaikan maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan (Nanga, 2005:109). Ciri-ciri penting dari konsumsi rumah tangga dalam teori pendapatan mutlak tersebut yaitu bahwa faktor terpenting yang menentukan besarnya pengeluaran rumah tangga baik perorangan maupun keseluruhan adalah pendapatan (Herlambang, 2001:211).

Fungsi konsumsi menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat disposable income dalam perekonomian dengan jumlah belanja konsumsi dimana faktor lain yang mempengaruhi konsumsi diasumsikan konstan (Mc earchern, 2000:174). Kajian ekonomi juga telah menunjukkan bahwa pendapatan merupakan penentu utama dari konsumsi (Samuelson, 2004:128).

Hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan konsumsi ialah Menurut Mantra (2003) jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak

pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Jadi, yang termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam umur non produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Hasil Susenas Tahun 2000 menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga atau ukuran keluarga berpengaruh terhadap konsumsi. Jumlah anggota rumah tangga atau ukuran keluarga dimana rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga cukup banyak yakni 5 orang atau lebih pemenuhan kebutuhan hidupnya sekitar 83% adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (Sijrat, 2005).

Menurut Rahardja Dkk (2005) semakin tinggi pendidikan seseorang pengeluaran konsumsinya juga akan semakin tinggi, sehingga mempengaruhi pola konsumsinya. Pada saat seseorang atau keluarga memiliki pendidikan yang tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak. Kondisi ini disebabkan karena yang harus mereka penuhi bukan hanya sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, tetapi juga kebutuhan informasi, pergaulan di masyarakat dan kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya. Pendidikan merupakan suatu investasi yang penting, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, maka seseorang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Maka dari itu, dengan pendidikan seseorang atau rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan

ekonomi dan memberantas kemiskinan melalui efek yang ditimbulkan yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Blanchard (2006) mendefinisikan kekayaan sebagai seluruh nilai aset dikurangi dengan liabilities (hutang). Asset yang tercakup antara lain kekayaan riil (rumah, tanah, mobil), finansial (deposito berjangka, saham, surat berharga). Ketika kekayaan rumah tangga meningkat, maka konsumsi akan mengikuti. Sehingga, status kepemilikan rumah dapat menjadi pengaruh rumah tangga dalam mengkonsumsi. Dengan demikian hipotesis tersebut dapat dikembangkan.

Hal ini lah yang memicu penulis untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Maka dari itu penulis mengambil judul “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pekerja PT. Seikou Di Kabupaten Bandung**”

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitian ini yaitu ingin melihat bagaimana pola konsumsi pekerja PT Seikou dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola konsumsi pekerja PT. Seikou?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan kekayaan terhadap konsumsi pekerja PT. Seikou?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi pekerja PT Seikou.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan keluarga, kekayaan, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan terhadap konsumsi.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademis**

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu ekonomi mikro dan diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan sumber referensi bagi para peneliti lebih lanjut.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris:

1. Bagi para praktisi bisnis guna mengetahui apa saja kebutuhan pekerja beserta konsumsinya.
2. Bagi Pemerintah yaitu untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan diharapkan berpihak kepada pekerja.
3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Pasundan menjadi tambahan referensi bagi perpustakaan.
4. Bagi Penulis/Peneliti menjadi media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.